

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah jenis parameter kesuksesan penyelenggaraan pembangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai tolok ukur secara makro. Namun, walaupun sudah dijadikan parameter pembangunan, sifat pertumbuhan ekonomi ini masih general serta belum dapat mempresentasikan kapasitas penduduk secara parsial. Harapannya pembangunan ekonomi daerah mampu memberikan efek positif bagi tumbuhnya ekonomi (Mahi & Trigunarso, 2017)

Menurut Arifin (2020) Salah satu indeks utama yang menunjukkan kesejahteraan penduduk dilihat dari pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dilakukan oleh negara, maka tentu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Sementara ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara positif, belum dapat menjamin pembangunan di negara tersebut berhasil. Hal ini sebab tolok ukur pembangunan negara dilihat dari tingkat keamanan, kesejahteraan, sumber daya berkualitas mencakup SDM dan lingkungan hidup. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka negara harus mengoptimalkan kualitas SDM. Sumber daya manusia yang bermutu dapat membuat penduduk lebih produktif, sehingga harapannya bisa meningkatkan pendapatan, dan terjadi pertumbuhan ekonomi (Adi, 2016).

Menurut Limpele dkk (2021) Pertumbuhan ekonomi ialah kondisi konkret dari efek kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertumbuhan yang berasal dari segala jenis bidang ekonomi yang tak langsung mencerminkan laju perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah menjadi parameter utama guna mengidentifikasi kesuksesan pembangunan serta bermanfaat dalam menetapkan kebijakan pembangunan kedepannya. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena dampak dari proses kenaikan pendapatan nasional riil maupun produk nasional bruto riil. Oleh karena itu, seringkali perekonomian disebut tumbuh apabila terjadi pertumbuhan pendapatan riil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ialah berkembangnya aktivitas perekonomian yang mengakibatkan kenaikan produksi barang serta jasa dan meningkatnya kesejahteraan penduduk (Setiyawati, 2013).

Menurut Sejati (2020), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menurut aktivitas perekonomian merupakan pengembangan produk barang serta jasa yang diproduksi suatu wilayah atau negara, misalnya kemajuan infrastruktur, penambahan total produksi barang industri, kenaikan jumlah sekolah, peningkatan produksi barang modal, serta sektor jasa. Menurut Jannah (2020), peningkatan GNP/GDP tanpa memandang apakah pertambahan ini lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan laju penduduk serta apakah struktur ekonomi berubah atau tidak. Diamati dari perspektif ekonomi, maka dua dampak utama yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan taraf hidup atau kesejahteraan penduduk dan bertambahnya jumlah kesempatan kerja kepada masyarakat.

Berdasarkan survey BPS yang menggunakan metodologi pendekatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017- 2021 cenderung mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi yang terus bertambah dan positif, seperti tampak pada tabel 1.1 dibawah ini :

TABEL 1.1.

Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kota Magelang	3.20	-2.45	5.41	5.46	5.42
Kota Surakarta	4.01	-1.74	5.78	5.75	5.7
Kota Salatiga	3.33	-1.68	5.88	5.84	5.21
Kota Semarang	5.16	-1.85	6.81	6.48	6.70
Kota Pekalongan	3.59	-1.87	5.50	5.69	5.32
Kota Tegal	3.72	-2.25	5.77	5.92	5.95

Data Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tahun 2017-2021

Sumber: BPS Jateng

Dari tabel 1.1 tersebut menyajikan perihal gambaran pertumbuhan ekonomi di daerah Jateng mulai tahun 2017 – 2021 tampak fluktuatif. Tercatat pada tahun 2017, Jawa Tengah mengalami pertumbuhannya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada riset ini dinilai dengan memakai data perekonomian ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). Merujuk pada data-data di atas, terlihat Kota Semarang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang sangat signifikan selama 2 tahun terakhir. Kota Semarang menjadi daerah penyokong utama pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan inti serta indeks utama untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan ekonomi daerah. Setiap daerah selalu dihadapkan pada permasalahan jangka panjang berupa pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah masih bersifat fluktuatif dan lebih rendah daripada DKI Jakarta, hal ini memicu penurunan pendapatan perkapita penduduk.

Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi bisa bernilai positif maupun negatif. Apabila pada kurun waktu tertentu pertumbuhan ekonominya positif maka aktivitas perekonomian saat itu juga meningkat. Kebalikannya, ketika perekonomian terjadi pertumbuhan negatif pada periode tertentu maka aktivitas ekonomi juga menurun saat itu. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebagai proses berubahnya keadaan perekonomian secara berkelanjutan ke arah kondisi lebih baik lagi yakni penambahan kesejahteraan penduduk sepanjang periode tertentu (Wasingah, 2018).

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) ialah salah satu kebijakan fiskal guna mengatur arah perekonomian melalui penetapan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah per tahun. Hal ini bisa diamati dalam APBN bagi wilayah nasional dan APAD untuk wilayah regional atau daerah. Kebijakan fiskal dimaksudkan guna menstabilkan tingkat penghasilan (output), harga, atau kesempatan kerja, serta memacu pertumbuhan ekonomi. DAU atau kepanjangan dari Dana Alokasi Umum adalah anggaran yang bersumber dari APBN, diperuntukkan untuk pemerataan menyangkut kapasitas finansial suatu wilayah dalam mendanai seluruh urusan rumah tangga daerahnya dalam

menjalankan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan DAU untuk mendanai atau menutupi kekurangan Pemda yang bisa digunakan Pendapatan Asli Daerah. Adapun fungsi DAU secara menyeluruh adalah untuk pemerataan, dengan mencermati luas wilayah, potensi daerah, kondisi geografisnya, tingkat penghasilan penduduk dan jumlah penduduk daerah tersebut (Wasingah, 2018).

Dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Alasan penggunaan PAD dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun

Menyangkut hal tersebut, peningkatan pendapatan daerah juga sangat dipengaruhi oleh strategi alokasi belanja daerah. Berkenaan dengan langkah mengoptimalkan kontribusi masyarakat pada pendapatan daerah, dianjurkan untuk meningkatkan alokasi Belanja Modal. Belanja Modal (*Capital Expenditure*) yang dilaksanakan Pemda antara lain perbaikan dan pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi, dengan begitu manfaat pembangunan daerah bisa dinikmati oleh publik. Sehingga, anggaran belanja daerah akan tidak wajar jika proporsi anggaran lebih besar untuk belanja. Makin tinggi penerimaan yang diperoleh daerah, baik yang bersumber dari PAD atau DAU, maka daerah akan dapat mendanai dan memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh warganya. Untuk menangani besarnya kebutuhan pembiayaan daerah dan persoalan *fiscal imbalance*, pemerintah mengalokasikan dana perimbangan, yang mana salah satu jenis dana yang berkontribusi besar ialah Dana Alokasi Umum (DAU). Selang beberapa periode berlangsung, DAU atas penerimaan daerah memiliki proporsi paling tinggi daripada penerimaan daerah lainnya, seperti PAD (Adi, 2016).

Alokasi dana dari pemerintah daerah berupa anggaran Belanja Modal yang berasal dari APBD ditujukan guna menambah aset tetap. Pengalokasian Belanja Modal tersebut dilandasi oleh kebutuhan terhadap infrastruktur dan sarana, baik fasilitas masyarakat ataupun untuk kelancaran penyelenggaraan tugas

pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah seyogyanya mengganti komposisi belanja sebagai langkah mengoptimalkan kualitas layanan publik. Kebanyakan belanja daerah sekarang ini dipakai untuk kebutuhan belanja rutin yang cenderung kurang produktif. Yuniarto & Adi (2018) menjelaskan bahwasanya penggunaan belanja semestinya diperuntukkan bagi sesuatu yang produktif, contohnya melaksanakan kegiatan pembangunan. Menurut Suyani & Pariani (2018), hendaknya penerimaan negara lebih dominan diperuntukkan untuk berbagai program peningkatan pelayanan publik. Dari gagasan di atas menyimpulkan belanja sangat penting dialokasikan untuk segala jenis kebutuhan publik.

Penggunaan variabel belanja modal pada penelitian ini didasarkan karena mengingat perananan penting dari belanja modal itu sendiri karena memiliki manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Kondisi ini menggambarkan ketergantungan yang tinggi dari Pemda terhadap pemerintah pusat akan pasokan dana. Meskipun begitu, ketergantungan sejenis ini semestinya makin berkurang. Masuknya segala bentuk investasi di pemerintah daerah harapannya antar pemerintahan dan dapat menjamin terwujudnya pelayanan publik yang prima di semua wilayah (Prakosa, 2017).

Salah satu persoalan yang selalu melekat dengan pembangunan ialah jumlah penduduk. Jumlah penduduk tidak hanya sebagai subjek, melainkan juga objek dalam pembangunan. Terjadinya jumlah penduduk yang berubah-ubah diperlihatkan melalui angka pertumbuhan penduduk. Selain itu, salah satu unsur

yang memengaruhi perekonomian bisa tumbuh yaitu jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk makin bertambah, maka bisa menyebabkan kenaikan permintaan akan produk (barang serta jasa), oleh karenanya kebutuhan ekonomi pun naik. Peneliti menggunakan jumlah penduduk sebagai salah satu variabel untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena jumlah penduduk dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa tahun 2017 – 2021 Jawa Tengah mengalami pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Tercatat jumlah penduduk pada tahun 2017 di Jawa Tengah mencapai 32.725.378 juta jiwa, serta meningkat menjadi 33.774.141 juta jiwa di tahun 2021. Berdasarkan pendapat para pakar ekonomi klasik menyebut kenaikan jumlah penduduk berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Hal ini mengindikasikan jika penambahan jumlah penduduk tidak bisa dikontrol maka akan sulit mencapai keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Jika mulanya jumlah penduduk yang sedikit ditambah melimpahnya sumber daya alam, maka laju pengembalian modal yang berasal dari investasi (penanaman modal) akan tinggi. Sehingga profit yang lebih besar akan diperoleh para pengusaha. Keadaan tersebut menghasilkan investasi baru, selanjutnya tercapai pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi demikian sulit berlangsung

secara berkesinambungan jika penduduknya terlalu tinggi, dimana kenaikan jumlah penduduk dapat mengurangi tingkat aktivitas perekonomian sebab produktivitas tiap-tiap penduduk cenderung negatif (Samsualam, 2021). Ketidakseimbangan antara penambahan jumlah penduduk dengan kesempatan kerja menyebabkan peningkatan angka pengangguran di daerah tertentu. Tingginya angka pengangguran ini menyebabkan rendahnya penerimaan nasional sebab kapasitas konsumsi penduduk menurun, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi pun mengalami penurunan.

Menurut Istanto, dkk (2021) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai unsur utama pencapaian pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia ialah tolok ukur terwujudnya pembangunan yang bisa memacu ekonomi daerah menjadi tumbuh. Tingginya tingkat pembangunan SDM memiliki peranan penting untuk memengaruhi kapasitas masyarakat dalam menyerap dan mengatur sumber dari pertumbuhan ekonomi, baik menyangkut kelembagaan atau IPTEK yang merupakan media utama agar perekonomian daerah tumbuh. Untuk meraih pertumbuhan ekonomi. BPS Prov. Jawa Tengah merilis laporan bahwasanya IPM daerah sebanyak 69,49% berada di bawah rerata IPM Nasional. Indeks Pembangunan Manusia di Jateng belum dapat menyetarakan tingkat IPM daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa.

TABEL 1.2.

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kota Magelang	79.43	78.99	78.80	78.31	77.84
Kota Surakarta	82.62	82.21	81.86	81.46	80.85
Kota Salatiga	83.60	83.14	83.12	82.41	81.68
Kota Semarang	83.55	83.05	83.19	82.72	82.01
Kota Pekalongan	75.40	74.98	74.77	74.24	73.77
Kota Tegal	75.52	75.07	74.93	74.44	73.95

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021

Sumber: BPS Jateng, diolah

Merujuk pada hasil laporan di atas, tampak bahwasanya bagi daerah, pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari parameter esensial untuk mengukur kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi ataukah belum. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat untuk mencapai pembangunan manusia sebab melalui pembangunan ekonomi bisa memastikan kenaikan produktivitas serta penambahan penerimaan dengan terciptanya lapangan kerja.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi bisa diamati salah satunya dari rendahnya angka kemiskinan dan tingginya IPM suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia adalah faktor utama guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara tajam. IPM menjadi indikator proses pembangunan dengan maksud supaya dapat mempunyai beragam pilihan, terutama dalam pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Jika suatu wilayah dengan tingkat kesehatan, pendapatan serta pendidikan yang tinggi, maka IPM pun meningkat, dengan

begitu tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Merujuk pada hal ini, maka bisa diamati jika tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan warga tinggi, artinya daerah tersebut juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia di gunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini karena memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada.

Penelitian terkait pertumbuhan ekonomi ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti yang pernah dilakukan oleh Sabilla dan Sumarsono (2022) dengan judul penelitian pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB yang mendapatkan hasil bahwa hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan signifikan dan positif, sedangkan Penanaman Modal Dalam negeri memiliki hubungan tidak signifikan namun positif. Kemudian Handayani, dkk, (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dia menemukan bahwa secara parsial PAD dan dana bagi hasil tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya Fitria (2020) menemukan pengeluaran pemerintah, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yunus dan Amirullah (2019) & Utami & Indrajaya (2019) mendapatkan hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian dari Mukarramah, dkk, (2019) menemukan hasil yang berbeda dengan peneliti lainnya yaitu Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berlandaskan berbagai fenomena di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian guna menganalisis besarnya pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2021.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021?

2. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Mengetahui dan memahami tingkat pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021

2. Dimanfaatkan Sebagai tambahan informasi perihal pertumbuhan ekonomi di 6 Kota Madya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021
3. Hasil penelitian ini harapannya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai sumber informasi atau informasi bagi penelitian selanjutnya.
4. Penelitian ini bisa dipakai oleh pemerintah sebagai informasi dalam penetapan kebijakan menyangkut upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu.